



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan, Kabupaten Maros selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 20 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/02/IX/2007 tanggal 1 September 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 168/Pdt.G/2013/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Pucak selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Juni 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele sehingga antara penggugat dan tergugat terus menerus berselisih.
6. Bahwa tergugat marah apabila penggugat terlambat pulang ke rumah padahal pekerjaan penggugat menuntut penggugat agar tinggal di kantor karena penggugat ditugaskan sebagai bendahara rutin dan selalu berkonsultasi ke Pemda Maros, itupun penggugat tidak pernah pulang malam hanya pulang sore.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan April 2011 kakak kandung penggugat yang bernama Darwiyah membawa anak bayi tetapi tergugat mengira penggugat yang membawa anak tersebut sehingga tergugat marah, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan mengatakan 'sampai disini saja hubungan kita' sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang

Hal. 2 dari 13 Put. No. 168/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan April 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa penggugat dan tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk bercerai sesuai surat pernyataan yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh imam Desa Pucak.
12. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Rekomendasi untuk melakukan perceraian Nomor 474.2/458/BKDD tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Maros.
13. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.



Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 3 Juni 2013 dan 14 Juni 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, penggugat membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 20 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 20 Mei 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Bupati Maros berdasarkan surat Nomor 474.2/458/BKDD bertanggal 3 Mei 2013 sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/02/IX/2007 tanggal 1 September 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 168/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama (dalam lingkup HAM), bertempat tinggal di Kompleks Blok Nomor .., Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah kewanitaan saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Pucuk selama 4 tahun.
- Bahwa awalnya antara penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juni 2009, karena tergugat sering marah-marah apabila penggugat terlambat pulang ke rumah padahal penggugat ditugaskan sebagai bendahara rutin dan selalu berkonsultasi ke Pemda Maros, dan tergugat marah kalau penggugat pulang sore.
- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2011 kakak kandung penggugat yang bernama Darwiyah membawa anak tetapi tergugat mengira penggugat yang membawa anak tersebut sehingga tergugat langsung marah, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan berkata kepada penggugat sampai disini saja hubungan kita.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua tergugat.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kecamatan Tompobulu, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Pucuk selama 4 tahun.
 - Bahwa awalnya antara penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juni 2009, karena tergugat sering marah-marah apabila penggugat terlambat pulang ke rumah padahal penggugat ditugaskan sebagai bendahara rutin dan selalu berkonsultasi ke Pemda Maros, dan tergugat marah kalau penggugat pulang sore.
 - Bahwa setahu saksi pada bulan April 2011 kakak kandung penggugat yang bernama Darwiyah membawa anak tetapi tergugat mengira penggugat yang membawa anak tersebut sehingga tergugat langsung marah, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan berkata kepada penggugat sampai disini saja hubungan kita.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari Bupati Maros, berdasarkan Nomor : 474.2/458/BKDD tanggal 3 Mei 2013, dengan demikian penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administrasi untuk menceraikan tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat marah apabila penggugat terlambat pulang padahal pekerjaan penggugat sebagai bendahara menuntut penggugat agar tinggal di kantor untuk sering berkonsultasi di Pemda, padahal penggugat tidak pernah pulang malam hari tergugat, puncaknya pada bulan April 2011 tergugat marah melihat kakak penggugat membawa anak bayi, tergugat mengira penggugat yang membawa anak tersebut. Bahkan tergugat meninggalkan penggugat dan mengatakan sampai disini saja hubungan kita. sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2011 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama, dan saksi kedua penggugat yang bernama, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2011 di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun.
- Bahwa sejak Juni 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah apabila penggugat terlambat pulang ke



rumah padahal pekerjaan penggugat sebagai bendahara selalu berkonsultasi di Pemda menuntut penggugat untuk tinggal di kantor.

- Bahwa tergugat marah karena tergugat melihat kakak kandung penggugat membawa anak bayi dan mengira penggugat yang membawa anak tersebut, bahkan tergugat mengatakan sampai disini saja hubungan kita.
- Bahwa sejak April 2011 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, yakni sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,..... terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013 M** bertepatan dengan tanggal **15 Syakban 1434 H** oleh ... sebagai ketua majelis, ... dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

.....

ttd

.....

KETUA MAJELIS,

ttd

.....

PANITERA PENGGANTI,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)